

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai Analisis Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar akuntansi pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan

dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan

3. Siklus akuntansi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan siklus akuntansi laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pandeglang sudah sesuai. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Siklus akuntansi laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pandeglang juga mengacu pada peraturan pemerintah ini, yang merupakan dasar untuk mengatur pelaporan keuangan pemerintah daerah.

B. Saran

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan keuangan SKPD. Sumber Daya Manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan pegawai dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada,

2. Bagi setiap SKPD hendaknya menggunakan sistem komputerisasi yang dapat mempermudah pekerjaan pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan.